

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur (PILGUB) Jawa Timur Tahun 2018

Pandangan Masyarakat Muslim (Islami) adalah suatu pendapat masyarakat yang dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam, satu-satunya agama Allah. Masyarakat yang secara kolektif atau orang perorangan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam menaati sirotul mustaqim. Masyarakat yang didominasi oleh istiqomah, kejujuran, kebersihan ruhani dan saling kasih mengasihi. Walaupun mereka berbeda-beda dalam tingkat dan kadar pemahaman terhadap rincian ajaran Islam, tetapi mereka telah memiliki pondasi yang sama untuk menerimanya secara totalitas.

Dalam al-Qur'an telah diberikan pandangan-pandangan umum tentang masyarakat yang hendak dibentuk oleh kaum muslimin, mengenai bentuk, model dan tatanan masyarakat itu sendiri sepenuhnya merupakan kreasi manusia untuk merumuskan agar sesuai dengan perkembangan peradabannya, kreasi itu sendiri didasarkan kepada interpretasi terhadap konsep-konsep dasar mengenai masyarakat dalam al-Qur'an.¹

¹ Andik Wahyun Muqoyyidin, "Masyarakat Islam Ideal dalam Konsepsi Filsafat Pendidikan Islam" *Jurnal Ilmiah Ilmu – Ilmu Keislaman*, (Vol.13 No.1, 2014) hal. 15

Sebagaimana data yang peneliti dapatkan bahwasannya Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, memiliki pendapat yang bermacam macam. Dapat dianalisis Partai politik pengusung dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur memang menjadi faktor seseorang pemilih untuk memilih, karena kalau melihat basic di Kabupaten Blitar sendiri yang rata - rata notabennanya warga nahdhiyyin jelas memilihnya kepada salah satu partai, semisal partai PKB atau PPP, kecenderungan kecenderungan itulah yang menjadi faktor pemilih untuk memilih pada pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, jadi warga masyarakat Kabupaten Blitar melihat dulu partai PKB memilih siapa, jadi itu perannya partai politik kepada pemilihan partai politik dalam Pilgub Jatim.

Dalam Partai islam pada Pilgub Jatim di kabupaten Blitar cukup mendominasi bahwasannya untuk Pilgub partai islam di Kabupaten Blitar yang sangat dominan ada dua seperti PKB dan PPP itu berseberangan dengan PKS yang sama - sama islam, tapi semua sangat berperan warga nahdhiyyin pasti melabuhkan pilihannya di partai PKB dan PPP , kemudian orang - orang PKS atau orang - orang di luar partai PKB dan PPP biasanya menjatuhkan pilihannya kepada partai PKS, jadi partai politik mewarnai dari pengikutnya, biasanya orang - orang yang di luar NU pasti memilih PKS. Dalam adanya partai politik pengusung masing masing calon gubernur dan wakil gubernur jawa timur tahun 2018 itu sangat penting, karena partai politik itu sebagai penyalur aspirasi, kontrol, pengatur, dan

sosialisasi politik, sebagai kendaraan politik dan bisa mengukur sejauh mana dukungan atau suara rakyat melalui partai politik.

Tidak semua masyarakat muslim kabupaten mengetahui bahwa sebenarnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki partai partai yang mengusungnya, karena kurangnya sosialisasi di tingkat bawah dan tidak semua orang aktif dalam media sosial. Pada dasarnya partai pengusung itu merupakan syarat dalam pencalonan dan sebagian masyarakat muslim ada yang mengetahui bahwa partai politik mempunyai peran yang positif akan tetapi masyarakat dalam menentukan pilihannya lebih memilih pasangan calon Gubernur yang mempunyai popularitas yang baik, bukan melihat dari partai politik yang mengusung calon calon tersebut.

Kalau untuk pengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu seperti pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestisto Dardak memiliki partai pengusung sebagai berikut: Partai Demokrat Partai Nasdem, Partai PPP, Partai Hanura, Partai Golkar dan Partai PAN. Nah untuk pasangan Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno memiliki partai pengusung sebagai berikut: Partai PDIP, Partai PKB, Partai PKS dan Partai Gerindra.

Keadaan pilkada pada tahun 2018 relatif aman tetapi masih ada terjadi pelanggaran kampanye, seperti berkampanye ditempat tempat pendidikan, kendala seperti golput dan money politik. Harapannya untuk pemilihan kedepan, pesta demokrasi yang dilaksanakan ini tidak hanya

menjadi formalitas saja, namun harus mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas, dan mampu merealisasikan visi dan misi yang digembor gemborkan, serta mampu membawa daerah daeah tersebut lebih maju dan berkembang.

Selain itu partai politik juga sangat diperlukan dalam menampung aspirasi rakyat berupa tuntutan dan kepentingan yang beragam yang disampaikan dalam berbagai cara. Parati politik, kemudian mengolah aspirasi itu dan merumuskannya, sehingga bisa diteruskan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan publik lainnya, dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum.²

Lemahnya partai politik, seringkali dianggap sebagai biang kerok dari segala kekacauan politik di Indonesia. Partai politik yang dalam pemilu presiden harus mencapai minimal 20 % suara dalam pemilu legislatif untuk bisa mengajukan calon tanpa koalisi, harus bekerja keras dalam menggalang dukungan guna mencapai target tersebut. Sedangkan dalam pemilu kepala daerah, untuk bisa dicalonkan seorang kandidat dari partai politik harus memiliki minimal 15 % dari keseluruhan suara. Hal ini membuat kandidat harus mengeluarkan dana untuk menggalang dukungan suara partai pengusung. Dalam data yang pernah dikeluarkan oleh Kompas, dana untuk pencalonan kepala daerah saja bisa mencapai 60 hingga 100 miliar. Dana fantastis yang tidak setara dengan pendapatan bulanan seorang kepala daerah.

² Hafied Cangara, *Komunikasi Politik : Konsep Teori dan Strategi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 170

Untungnya, kelemahan ini selalu mampu dikritisi oleh kekuatan - kekuatan dari kaum terpelajar dan mereka yang senantiasa setia pada idealisme advokasinya. Ketidakmampuan dan ketidakcakapan pada wakil-wakil rakyat pada akhirnya membangun pesimisme terhadap partai politik yang membentuknya. Konstituen hanya menjadi penting tatkala mereka belum menjadi siapa-siapa. Kampanye program-program yang lebih banyak tidak jelas dan tidak terarah kemudian tinggal menjadi janji-janji yang tidak pernah ditepati ketika para wakil rakyat tersebut telah terpilih. Sehingga, pencapaian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak dapat diukur.³

Salah satu pilar demokrasi suatu negara adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pemilu mendapat legalitas dari ajaran islam dan merupakan sebuah prosesi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil - wakil rakyat dilembaga legislatif atau disebut dengan ahlul halli wal'aqdi, maupun kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernur atau bias disebut dengan Khilafah.

³ Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Negara Refesentasi", *Jurnal Politik Profetik*, (Vol 3 No 1, 2014) hal. 3

B. Pandangan Masyarakat Muslim Kabupaten Blitar Terhadap Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur (PILGUB) Jawa Timur Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Dalam Pandangan masyarakat muslim Kabupaten Blitar terhadap Partai Politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur masih banyak yang tidak memperdulikan adanya partai politik yang mengusung calon tersebut. Padahal di kabupaten Blitar mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada umatnya tentang segala hal baik untuk kepribadian maupun untuk kepentingan umat. Maka dalam hal ini Islam mengajarkan bahwasannya mengetahui aturan tentang politik itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap berdemokratis maka dari itu sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara tidak dibenarkan.

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji.

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdi dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah.⁴

⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 87.

Anjuran umat islam mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran : 104)*

Berdasarkan ayat diatas umat islam dianjurkan untuk mengikuti golongan yang ber'amar ma'ruf nahi munkar, karena kita sebagai umat muslim maka jelas partai politik akan menjadi toloak ukur kami dalam memilih pemimpin. Karena itulah mengapa umat islam cenderung memilih pemimpin yang parpol pengusungnya berasaskan islam. Hal ini sesuai dengan fiqih siyasah yang tidak mengukur partai politik baik secara nasional maupun secara lokal melainkan mengukur dari segi prinsip yang terdapat dalam tatanan fiqih siyasah, seperti prinsip perdamaian, prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan dan persatuan, dan prinsip keadilan.

⁵ *Ibid.*

Bila Al-quran dan sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdi atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri.

Ulil amri adalah istilah syar’i yang terdapat didalam Al-quran. Ulil amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara’. Oleh karena itu cara mengembalikan permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah Ahlu al- Halli Wa al- ‘Aqdi.⁶

Tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Abu Ja’la al Hambali mensyaratkan suku Quraisy sebagai calon pemimpin, sebab suku Quraisy tidak pernah gagal menghasilkan sejumlah orang yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pemimpin yang tangguh. Karena itu tidak sah menurut hukum mengangkat kepala pemerintahan di luar golongan itu.⁷ Maka untuk partai pengusung harus jeli dalam memilih calon pemimpin yang harus diusungnya, karena para pemimpin harus dari bangsa Quraisy.

Allah swt telah menjelaskan dalam berfirman yaitu sebagai berikut:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۗ

⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, hal. 92

⁷ Suyuti Pulungan, *Hukum Tata Negara Islam*, (Jakarta, Rajawali, 1997), hal. 256.

وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak bapak, atau anak-anak atau Saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka Itulah orang-orang yang Telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” (Q.S. Al Mujadalah: 22)⁸

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya